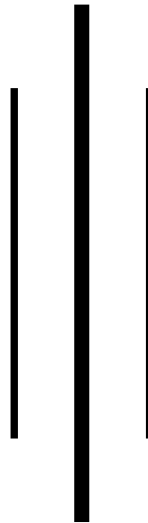




PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BOJA TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BOJA**

Jl. Pramuka No. 07 Boja, Telp./Fax. (0294)571002

Laman: kecboja.kendalkab.go.id, Pos-el : kecboja@gmail.com 51381

KATA PENGANTAR

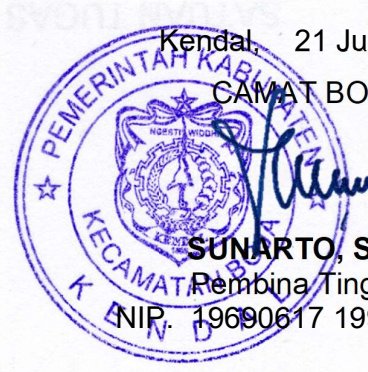
Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, bahwa setiap SKPD diharuskan menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai acuan perencanaan kegiatan kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Boja Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Boja Tahun 2025, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025 yang akan datang.

Dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Boja, yang telah membantu dalam penyusunannya. Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja di tahun yang akan datang.

Kendal, 21 Juli 2025
CAMAT BOJA,

SUNARTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199803 1006



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	 6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	 6
2.2 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 22
BAB IV PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025.....	Hal 15
2	Tabel 2.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kendal	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir RKPD Perubahan. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD Perubahan yang disusun ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati RKPD Tahun 2024

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021-2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2023. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintah Daerah.

1.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Boja Tahun 2025, dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Boja tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran–sasaran strategis, program–program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan yang dipergunakan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan pendanaan Perangkat Daerah..

BAB IV. Penutup

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan satu secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat terlaksana dan memenuhi output yang diharapkan. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Boja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Boja selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2025 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

- ***Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

- ***Capaian Analisis Kinerja***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, dan mengukur capaian Kinerja yang telah dicapai oleh kinerja Kecamatan

Untuk Tahun 2025 Rencana Kerja awal di Kecamatan Boja sebesar Rp. 3.904.145.965,- Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Boja Tahun 2025 diuraikan secara singkat dengan hasil Kegiatan sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Boja secara keseluruhan terealisasi 10,35% yang dijabarkan dalam kegiatan:

Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pencapaian: sampai Triwulan I, dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp 0,- atau terealisasi 0%, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum terlaksana karena menyesuaikan Rencana Anggaran Kasnya, dengan capaian Kinerja 0%
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp.3.010.236.964,- dan anggaran yang terserap Rp. 307.800.122,- atau terealisasi anggaran 10,23 %. dengan capaian Kinerja 100%
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.879.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 1.971.000,- atau terealisasi 68%. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 57.252.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 11.322.000 ,- atau terealisasi 20 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.200.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 1.971.000 ,- atau terealisasi 38 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.500.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 1.647.500 ,- atau terealisasi 47 %, Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan dengan capaian Kinerja 100%

- Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 21.650.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 4.252.000 ,- atau terealisasi 0 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 217.853.201 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 4.300.000,- atau terealisasi 2 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 48.000.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
- e. Kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.000.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 2.000.000,- atau terealisasi 33 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 56.300.000,- dan anggaran yang terserap 10.057.407,- atau terealisasi 18 %. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 93.250.000,- dan anggaran yang terserap 26.450.304,- atau terealisasi 28%. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan pencapaian sampai Triwulan I dengan jumlah dana sebesar Rp. 40.435.800,- dan anggaran yang terserap

4.200.00,- atau terealisasi 10%. Capaian sudah memenuhi target bulannya, dengan capaian Kinerja 100%

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp24.929.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 100%,. Capaian sudah memenuhi, dengan capaian Kinerja 100%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Pencapaian kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan secara keseluruhan terealisasi 0 % yang dijabarkan dalam kegiatan :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.050.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
 - Pelaksana urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.500.000 ,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah terlaksananya Pemberdayaan di tingkat desa untuk menunjang pembangunan secara keseluruhan terealisasi 0% yang dijabarkan dalam kegiatan :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 14.560.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 10.000.000,- atau terealisasi anggaran 69%. dengan capaian Kinerja 100%
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 154.120.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,-

atau terealisasi 0%. Capaian belum sesuai, karena masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan, dengan capaian Kinerja 100%

- Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 20.400.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Capaian belum sesuai, karena masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan, dengan capaian Kinerja 100%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pencapaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Koordinasi berkaitan dengan Pengamanan Wilayah di Kecamatan terealisasi 0 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan sub kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 49.440.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum

Pencapaian kinerja kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum adalah terlaksananya kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif di tingkat desa secara keseluruhan terealisasi 0 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.200.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terlaksananya kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif di tingkat desa secara keseluruhan terealisasi 0 %, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan
 - Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.100.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
 - Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 24.920.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
 - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.000.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pencapaian sampai Triwulan I atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 24.920.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0 ,- atau terealisasi 0 %, karena kegiatan dilaksanakan pada Semester II. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
 - Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya dengan pencapaian sampai Triwulan II atau semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.250.000,- dan anggaran yang terserap Rp. 0,- atau terealisasi 0%. Belum dilaksanakan karena belum dibelanjakan, dengan capaian Kinerja 0%
1. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan, Program/kegiatan yang memenuhi dan/atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan adalah :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi Sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak tercapai karena penyusunan laporan capaian kinerja dilaksanakan akhir tahun.

2. Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target dan/atau melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang telah ditetapkan Program/ kegiatan yang memenuhi dan/atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan adalah :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang meliputi sub kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat
 3. Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan Program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditetapkan nihil.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
 - a) Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan antara lain :
 - 1) Adanya Surat Edaran Pembatasan Dalam Penyusunan RKA seluruh Perangkat Daerah se- Kabupaten Kendal;
 - 2) Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati Kendal, sehingga anggaran harus digeser ;
 - b) Faktor yang mendukung tercapainya kegiatan karena adanya komitmen semua pihak untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bagian untuk pencapaian perjanjian kinerja perangkat daerah.
 - c) Faktor yang menjadi penyebab melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah nihil
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara umum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun demikian guna meningkatkan pelayanan Kecamatan Boja, perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan yang langsung mendukung smartcity, bersentuhan dengan kebutuhan layanan kepada masyarakat.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penghambat adalah dengan perencanaan dan penganggaran yang mendukung percepatan Pelayanan Kecamatan Boja antara lain :

- a) pengajuan penambahan kekurangan anggaran pada perubahan RKPD untuk kegiatan-kegiatan yang kurang anggaran pada penetapan anggaran;
- b) pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan perubahan kebijakan/ prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 Kecamatan Boja, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

❖ Analisis IKU Kecamatan Boja

Faktor pendukung tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP
- b. Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala subbagian dan aparatur Kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran
- c. Manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas

❖ Faktor penghambat tercapainya nilai SAKIP ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- c. Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

❖ Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan tercapainya Nilai IKM
- b. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
- c. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.

❖ Faktor penghambat tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.
- b. Kurang informatif; informasi kurang tersebar luas kepada masyarakat

- c. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.

masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, kurangnya promosi dan sosialisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Boja sampai dengan Semester I untuk nilai SAKIP dari target 73 realisasi 73,65 (100,89 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena semua eviden SAKIP sudah dilaksanakan lengkap beserta data dukung dan hasil rekomendasi LHE AKIP sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan. Nilai IKM dari target 87,37 realisasi 93,80 (107,35%) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena pelayanan di Kecamatan Boja sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, pelayanan cepat dan mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Boja.

Berdasarkan formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Boja dari aplikasi Si-Eva bahwa Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 94,41 (Tinggi), Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah 9,52% (sedang). Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Boja sebesar Rp. 3.904.145.965,- (Tiga milyar Sembilan ratus empat ratus juta seratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 371.719.333,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) realisasi fisik sebesar 9,52 % (sedang), masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Ada Program/Kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi Target Kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan. Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang diuraikan dibawah ini sekaligus Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah kebijakan efesiensi dari pemerintah pusat, kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Boja sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat di tabel 2.1 berikut ini :

Tabel TC 2.9
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BOJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN BOJA								
	UNSUR KEWILAYAHAN								
01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14	14	14	100	14	6	4

			Tunjangan ASN							
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	100	12	0	4
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	0	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	68	12	6	4
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	20	12	6	4
2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	38	12	6	4
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	47	12	6	4

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	0	12	6	4
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	0	12	0	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	2	12	6	4
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>							
3		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	36	36	0	36	0	0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	4	0	4	0	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	33	12	6	4
4		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	12	18	12	6	4

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	28	12	6	4
5			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	10	12	6	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	2	2	0	7	1	3
	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan		100	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1	1	83,5	1	0	0
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	100	100	100	100	100
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14	14	14	100	14	6	100
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	2	2	100	2	2	0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	5	99,87	5	1	6.77
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	1	1	100	0	0	0
		Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	1	100	0	0	0
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban		100	100	100	100	100	100

			yang ditangani							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>							
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	1	100	0	0	0
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		100	100	100	100	100	100
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</i>							
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	18	18	100	18	18	100
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18	18	18	100	18	18	100
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa	18	18	18	100	18	18	100

				di wilayahnya							
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Boja Kab. Kendal

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target renstra PD Tahun 2025	Realisasi Capaian Triwulan I Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	Nilai rata-rata IKM	Indeks reformasi birokrasi	-	93	96,03	93

2.2 Realisasi Keuangan Kecamatan Boja

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Pagu		Realisasi sampai TW.I 2025	Prosentase capaian
			Rkpd 2025	Apbd 2025		
	KECAMATAN BOJA					
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN		3.117.255.048	3.904.145.965		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	3.038.355.048	3.592.325.965,	371.719.333	10,35
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		3.592.685.965	307.800.122	10,23
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.592.685.965	307.800.122	10,23
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase hasil penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>		308.344.201	21.211.500	7
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.879.000	1.971.000	68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		57.252.000	11.322.000	20
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5.200.000	1.971.000	38
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		3.500.000	1.647.500	47

		Disediakan				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2.165.0000		0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		217.853.201	4.300.000	2
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		48.200.000	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.000.000	2.000.000	33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		56.300.000	10.057.407	18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		93.250.000	26.450.304	28
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40.435.800	4.200.000	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		24.929.000	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		2.050.000	0	0
	Pelaksana urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang</i>		2.500.000	0	0

		<i>Dilimpahkan</i>				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		14.560.000	10.000.000	17
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		154.120.000	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20.400.000	0	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>		49.440.000	0	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		49.440.000	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah dokumen kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan</i>		11.200.000	0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		11.200.000	0	0

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		57.550.000	0	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan hasil koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</i>		57.550.000	0	0
	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>		3.100.000	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		24.920.000	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des</i>		24.920.000	0	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>		3.360.000,	0	0
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahny</i>		1.250.000,	0	0

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menangani berbagai urusan otonomi daerah, dan sebagai penjabaran misi yang kelima seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Kecamatan Boja yaitu “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan”. Tahun 2025 Renja Kerja Perubahan Kecamatan Boja memasang Plafond Anggaran sebesar Rp 3.904.145.965,00,- sehingga dapat dijabarkan dalam program dan Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran Rp 3.592.325.965,00

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 5.000.000,00, dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 disesuaikan/ dikurangi menjadi Rp. 1.250.000,00
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 2.858.476.890,00
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan Pencapaian sampai dengan Triwulan I atau Semester I dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.986.526.964,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 disesuaikan/ dikurangi menjadi Rp. 2.858.476.890,00
3. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah Rp. 147.496.201,00
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 2.879.000,00, anggaran tetap
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 57.252.000,00, dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 disesuaikan/ dikurangi menjadi Rp. 32.187.000,00
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 4.000.000,00, dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 disesuaikan/ditambah menjadi Rp. 5.200.000,00
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 3.500.000,00, dalam APBD 2025 tetap tidak mengalami perubahan

- e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp. 21.650.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 disesuaikan/dikurangi menjadi Rp. 13.290.000,00
 - f. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 242.403.201,,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 disesuaikan/ dikurangi menjadi Rp. 90.440.200,00
4. Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 48.200.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan penambahan menjadi Rp. 0,00
5. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah Rp. 155.550.000,00
- a. Penyediaan surat menyurat Rp. 6.000.000,00 anggaran tetap
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp. 56.300.000,00 anggaran tetap
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 93.250.00,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan pengurangan menjadi 119.630.000,00
6. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah sebesar Rp. 65.364.800,00
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan Rp. 40.435.800,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan Pengurangan menjadi Rp. 27.355.800,00
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 24.929.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan pengurangan menjadi Rp. Rp. 0,00

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Anggaran Rp. 4.550.000,00 untuk kegiatan :

- 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha Rp. 2.050.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan kegiatan ini dirubah karena tidak mungkin dilaksanakan sehingga dialihkan ke kegiatan lainnya menjadi Rp. 0,00

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp. 2.500.000,00 mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan pengurangan menjadi Rp. 0,00

C. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, anggaran sebesar Rp. 73.580.000,00 dipergunakan untuk :

- 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Rp. 73.580.000,00
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan sebesar Rp. 14.560.000,00 anggaran tetap
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja dan Kecamatan Rp. 154.120.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan pengurangan menjadi Rp. 47.820.000,00
 - c. Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Rp. 20.400.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan pengurangan menjadi Rp. 11.200.000,00

D. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum, anggaran sebesar Rp. 0,00 dipergunakan untuk :

- 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Rp. 0,00
 - a. Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 49.440.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan Pengurangan menjadi Rp. 0,00

E. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, anggaran sebesar Rp. 0,00 dipergunakan untuk :

- 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Rp. 0,00
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dianggarkan sebesar Rp. 11.200.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 dengan Pengurangan menjadi Rp. 0,00

F. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, anggaran sebesar Rp. 43.840.000,00 dipergunakan untuk :

1. Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 43.840.000,00
 - a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dianggarkan sebesar Rp. 3.100.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 anggaran Tetap, karena sudah terealisasi
 - b. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 3.100.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 anggaran Tetap, karena sudah terealisasi
 - c. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebesar Rp. 2.750.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBD 2024 dengan penambahan menjadi Rp. 35.000.000,00 anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan Sosialisasi Dana BKK Dusun dan Kegiatan Apel SPJ Dana Desa, serta Kegiatan Monitoring Ke Desa-desa se Kecamatan Boja
 - d. Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dianggarkan sebesar Rp. 1.920.000,00, Kegiatan ini dipergunakan untuk Pendampingan Pengangkatan Perangkat desa dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - e. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dianggarkan sebesar Rp. 3.100.000,00 dan mengalami perubahan dalam APBDP 2025 anggaran Tetap, karena sudah terealisasi

Jumlah Anggaran Rencana Kerja perubahan Kecamatan Boja Tahun 2025 sebesar Rp. 3.333.928.891,00 (*Tiga Milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah*). Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah terlampir pada tabel hasil print out SIPD RI dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Boja Tahun Anggaran 2025, merupakan proyeksi program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran yang direncanakan pada tahun 2025 yang akan datang. Dalam penyusunan perubahan Renja ini memasukkan seluruh program dan kegiatan yang diperlukan, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Boja Tahun 2021 - 2026. Namun apabila dalam pelaksanaannya anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran disesuaikan dengan anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja ini didasarkan pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, serta Rencana Strategis Kecamatan Boja Tahun 2021 – 2026. Renja sebagaimana dimaksud merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Boja Tahun 2025, guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana strategis Kecamatan Boja Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan , sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan.

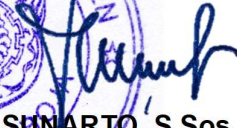
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal.
4. Dalam Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2025 berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya antara lain: RPJMD, Renstra Kabupaten RKPD Kabupaten, Renstra Kecamatan Boja.
5. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan / kegiatan Kecamatan Boja tahun 2025 setelah adanya Perubahan Anggaran.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan / kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan,
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara , terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.

4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan. Dalam sinegritas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD yang membawahi Perencanaan (Baperlitbang) agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran sangat kami harapkan. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Boja.

Boja, 21 Juli 2025
CAMAT BOJA,

SUNARTO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP.19690617 199803 1006

